

Semua Jenis Sepeda Boleh Masuk MRT Gerbong Khusus

JAKARTA (IM) - Dalam rangka mendukung Gerakan Bersepeda di Ibu Kota pada 24 Maret 2021, PT Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta mengizinkan semua jenis sepeda diperbolehkan masuk ke kereta.

Direktur Utama PT MRT Jakarta (Persero) William Sabandar menyebut, selama ini MRT hanya memperbolehkan sepeda lipat (folded bike) masuk ke dalam kereta. Nantinya, perusahaan juga akan menyiapkan fasilitas bagi sepeda no lipat.

"Jadi kebetulan apabila yang dinaiki bukan 'folded bike', memang harus dipersiapkan dengan hati-hati, tapi kami ingin laporkan dulu persiapannya. Softlaunching direncanakan di 24 Maret pada tiga stasiun," ujar William dalam diskusi virtual,

Rabu (17/3).

Kemudian, kata dia, penyediaan fasilitas untuk sepeda nonlipat itu rencananya akan diluncurkan minggu depan di tiga stasiun, yakni Lebak Bulus Grab, Blok M BCA, dan Bundaran HI.

Selama ini, kata dia, sepeda lipat diizinkan masuk dengan dimensi tertentu. Ketentuan sepeda lipat yang diizinkan masuk MRT adalah sepeda dengan dimensi tidak melewati 200 cm x 55 cm x 120 cm, dengan lebar ban maksimal 15 cm.

"Nantinya akan ada gerbong khusus yang akan kita peruntukkan. Ini sedang kita godok konsepnya. Dengan inisiatif ini, Jakarta akan semakin ramah bukan hanya pada pejalan kaki, tapi juga para pesepeda," katanya. ● ber

100-an ASN dan 100-an Lansia Ikuti Vaksinasi di Puskesmas Setiabudi

SETIABUDI (IM) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan vaksinasi Covid-19 terhadap aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat lanjut usia (lansia), di Gedung Nyi Ageng Serang, Puskesmas Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (16/3). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memantau langsung kegiatan tersebut.

Total kurang lebih 100 ASN Pemprov DKI Jakarta dan 100 lansia mengikuti vaksinasi. Anies pun menjelaskan tata cara bagi lansia yang ingin divaksin.

"Untuk warga lansia DKI Jakarta yang ingin mendaftar vaksin melalui website dki.kemkes.go.id, silakan pilih lokasi vaksinasi terdekat," tulis Anies di laman Instagram @aniesbaswedan, Selasa (16/3). Saat ini Pemprov DKI Jakarta mencanangkan program vaksinasi yang lebih dinamis berbasis wilayah ke lokasi target warga. Ini merupakan upaya menjadikan vaksinasi lebih efektif bagi para lansia.

Satgas menyebutkan 10,7 persen kasus terkonfirmasi positif yang menyerang kalangan lansia di atas 60 tahun, bahkan 48,8 persen kasus pasien meninggal du-

nia akibat covid-19 berasal dari kelompok ini. Hal tersebut menjadikan lansia lebih rentan dari kasus kematian akibat covid-19 dibanding kelompok masyarakat lain.

Satgas menyebutkan 10,7 persen kasus terkonfirmasi positif yang menyerang kalangan lansia di atas 60 tahun, bahkan 48,8 persen kasus pasien meninggal dunia akibat covid-19 berasal dari kelompok ini. Hal tersebut menjadikan lansia lebih rentan dari kasus kematian akibat covid-19 dibanding kelompok masyarakat lain.

Artinya lansia memerlukan perhatian khusus agar terlindung dari berbagai risiko covid-19. Salah satu caranya yaitu dengan menjaga nutrisi harian serta pemberian vaksin bagi lansia. Dokter Penyakit Dalam Sub Spesialis Geriatric Siti Setiati menekankan pentingnya mempersiapkan para lansia agar vaksinasi bekerja dengan optimal. "Hal yang perlu dipertimbangkan terkait vaksinasi pada lansia adalah terjadinya immunosenescence atau disfungsi imunitas karena usia. Hal ini berhubungan dengan respons terhadap vaksin yang kurang maksimal," ucap Siti. ● ber



FOTO: ANT

PRODUKSI SANGKAR BURUNG

Perajin menjemur sangkar burung buatanya di YR Sangkar, Cimanggis, Depok, Rabu (17/3). Perajin menjual sangkar burung Rp150 ribu hingga Rp500 ribu per sangkar yang dijual ke berbagai kota.

Terkait Penjualan LKS, Disdik Panggil Kepala SDN 06 Sukaresmi

CIKARANG PUSAT (IM) - Sejumlah orang tua siswa SDN 06 Sukaresmi, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengeluhkan pembelian lembar kerja siswa (LKS) dari pihak sekolah. Pemasalannya pada masa pandemi Covid-19 seperti ini, siswa masih belajar daring dan kondisi ekonomi mereka ikut terpuruk.

Sakah satu orang tua siswa kelas III dan kelas IV yang minta identitasnya tidak disebut mengatakan, jika harga lembar kerja siswa tersebut variatif, tergantung kelasnya yakni, antara Rp 120.000 sampai Rp sampai Rp125.000 per siswa.

Sejak anaknya kelas I hingga kelas IV sekarang ini, sambung orang tua tersebut, setiap tahunnya selalu membeli lembar kerja siswa (LKS) melalui gurunya.

"Sejak anak saya di kelas I hingga sekarang sudah kelas IV, setiap tahun harus beli LKS melalui gurunya," ujarnya.

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Adi Maryadi ketika dimintai tanggapannya terkait penjualan LKS tersebut, Selasa (16/3) mengatakan,

Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi melarang sekolah menjual LKS kepada siswa. "Laporan ini akan ditindaklanjuti," imbuhnya.

Adi Maryadi yang dihubungi kembali, Rabu (17/3) mengatakan, jika laporan tersebut sudah ditindaklanjuti.

"Laporan abang sudah ditindaklanjuti dan saya sudah komunikasi dengan pimpinan dan seksi yang lain," imbuhnya lagi.

Ditanya terkait hasil tindak lanjut dimaksudkannya seperti apa, Adi Maryadi mengatakan, untuk lebih jelasnya agar wartawan datang saja ke Bidang GTK.

Kepala Bidang Pembinaan Guru, Tenaga Kependidikan dan Penjaminan Mutu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Asep Permama ketika ditemui di ruangannya, Rabu (17/3) sedang ada tamu.

"Lagi ada tamu, bang," ujar salah sat stafnya.

Sumber media ini menjelaskan, semenjak Saiful Mikdar menjabat kepala SDN 06 Sukaresmi, setiap tahun pihak sekolah menjual LKS. Walaupun ada surat edaran larangan menjual LKS dari disdik, tidak digubris. ● ris

4 | Metropolis

IDN/ANTARA



VAKSINASI COVID-19 PEGAWAI KPU

Petugas menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada Plt Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra di halaman kantor KPU, Jakarta, Rabu (17/3). KPU bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan menggelar kegiatan vaksinasi COVID-19 tahap pertama pada 17-18 Maret 2021 yang dilakukan kepada 1.057 pejabat dan pegawai di lingkungan KPU.

Pemprov DKI Tak akan Pakai Hak Diskresi untuk Menjual Saham Perusahaan Bir

Pemprov DKI masih terus menunggu persetujuan dari DPRD untuk penjualan saham perusahaan bir. Dipastikan, Anies tidak akan menggunakan hak diskresinya.

BALAI KOTA (IM) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Gubernur Anies Baswedan tidak akan menggunakan hak diskresi untuk menjual saham milik Pemprov DKI di perusahaan bir.

"Kita tidak pernah mengambil diskresi-diskresi di luar yang tidak lazim," ujar Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/3).

Riza mengatakan, selama ini hubungan antara eksekutif dan legislatif Pemprov DKI masih cukup baik sehingga diharapkan penjualan saham Pemprov DKI di PT Delta bisa melalui jalan diskusi.

"Terkait saham bir masih kita diskusikan bersama," kata Riza.

Riza mengatakan, proses penjualan PT Delta sejauh ini masih dalam tahap diskusi hasil kajian yang dimiliki Pemprov DKI. Pemprov DKI masih terus menunggu persetujuan dari DPRD untuk segera melanggengkan janji kampanye Gubernur Anies itu.

"Kan harus mendapat persetujuan dulu, kita tunggu persetujuan dari DPRD," ucap Riza.

Riza juga memastikan kebijakan penjualan saham

tersebut akan terwujud karena merupakan janji kampanye dari Anies-Sandi saat Pilkada 2017 lalu.

"Ini kan masalah janji Anies-Sandi ketika itu, pemimpin karena janji kan harus memenuhinya," kata Riza.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco sebelumnya menilai, Gubernur DKI tidak bisa menggunakan hak diskresi untuk menjual saham.

"Mana bisa?" kata Basri melalui pesan singkat, Rabu (17/3).

Basri mengatakan, penjualan saham milik Pemprov DKI harus persetujuan DPRD.

Dia meminta agar Ketua DPRD DKI mau menjalani proses dan tidak perlu takut untuk disalahkan soal penjualan saham tersebut.

"Jalankan saja prosesnya di Dewan, tidak perlu takut disalahkan dan lain-lain lah," kata Basri.

Basri meminta agar Prasetio tidak arogan dan memaksakan kehendak tidak menjual saham PT Delta. DPRD DKI, kata Basri, bukanlah milik Prasetio sendiri, melainkan lembaga kolektif kolegial yang semua anggota memiliki hak suara. "Prosesnya dijalankan su-

paya rakyat tau dan (untuk) menjaga marwah Dewan sebagai lembaga wakil rakyat," kata Basri.

Sebelumnya, Prasetio masih ngotot tak ingin saham PT Delta di perusahaan bir dijual. Alasannya, ada potensi kerugian negara jika saham tersebut dijual oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Gue ini muda keluar masuk penjara, enggak mau masuk penjara lagi," kata Prasetio, Selasa (16/3).

Prasetio mengatakan, tidak ingin terlibat apabila Pemprov DKI ngotot menjual saham PT Delta Djakarta dan meminta Anies menggunakan hak diskresi.

"Silakan saja putusin (jual saham), Gubernur (Anies) punya diskresi kok," tuturnya.

Dia berulang kali mengatakan tidak ingin terlibat dalam penjualan saham PT Delta tersebut. Ia menilai tak ada alasan genting Pemprov DKI Jakarta mengajukan penjualan saham perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk.

Dia mempertanyakan kepada Pemprov DKI Jakarta mengapa begitu ngotot menjual saham perusahaan bir tersebut.

"Ini ada apa? Ada apa orang yang menggembu-gebu untuk menjual (kepemilikan saham) PT Delta," kata Prasetio.

Menurut Prasetio, perusahaan bir tersebut tidak memiliki masalah yang merugikan Pemprov DKI Jakarta. DKI Jakarta sendiri secara historis tidak pernah menyuntikkan saham ke perusahaan tersebut.

DPRD: Tidak Ada Status Peruntukan Lahan yang Dibeli Pemprov DKI di Manjul

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengungkapkan tidak ada status peruntukan terkait lahan yang dibeli Pemprov DKI Jakarta di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur. KPK tengah mengusut pembelian lahan tersebut karena diduga korupsinya.

Dia mengatakan, sudah melakukan klarifikasi kepada Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD). Hasilnya, tidak ada dokumen yang mencantumkan status peruntukan lahan tersebut.

"Saya sudah klarifikasi ke BP BUMD ternyata tidak ada dokumen yang mencantumkan peruntukannya untuk pembelian tanah di Sarana Jaya," kata Aziz melalui pesan singkat, Rabu (17/3).

Abdul Aziz mengaku hanya mendapat penjelasan secara lisan rencana lahan tersebut digunakan untuk pembangunan rumah DP Rp 0. "Perencanaan untuk DP 0, tapi secara otentik tidak dicantumkan dalam dokumen," ujarnya.

Politikus PKS ini menegaskan, pihaknya akan mempertanyakan status peruntukan lahan tersebut di rapat kerja bersama Perumda Sarana Jaya dua pekan depan. "Ya pasti itu (akan ditanyakan)," kata Aziz.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebelumnya mengaku bahwa dirinya maupun Gubernur DKI Anies Baswedan tidak mengetahui detail soal pembelian lahan kawasan Munjul.

"Kami minta dinas-dinas, BUMD untuk menyiapkan. Masing-masing bekerja, jadi kami tidak masuk wilayah teknis," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Rabu (10/3) lalu.

"Nggak mungkin lah gubernur-wagub ngurusin yang teknis-teknis, yang besar-besarnya saya menyita waktu, apalagi masuk wilayah teknis. Itu tugas dinas, tugas sudin," katanya.

Program rumah DP Rp 0 ini, kata Riza, adalah penugasan dari Pemprov DKI Jakarta sesuai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022 yang dipercayakannya kepada Sarana Jaya, mulai dari pembelian lahan, pembangunan unit hunian hingga pemasarannya.

"Jadi intinya tanah yang dibeli Pemprov DKI Jakarta macam-macam, ada yang dibeli oleh Dinas SDA untuk pengendalian banjir, oleh Dinas Pertamanan untuk RTH, Dinas Bina Marga untuk infrastruktur, macam-macam peruntukannya," kata Riza.

Kasus yang menyeret Dirut PT Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan, Riza menyatakan, tidak mengganggu program Pemprov DKI, terutama rumah DP Rp 0. "Di Sarana itu kan tidak Pak Yoory sendiri, ada direktur yang lain, ada manajer dan jajarannya, dan ini kan bekerja bukan individu, ini

kerja kolektif. Jadi kalau ada satu yang kebetulan sedang menjalani proses hukum, tidak berarti mengganggu, tidak ada masalah," katanya.

"Dan kita tunggu mudah-mudahan Pak Yoory bisa mengahdapinya, bisa menjelaskan fakta dan data dan bisa selesai segala urusannya," tambah Riza.

KPK tengah melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi, untuk Program DP0 Rupaiah Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta. Dari sembilan objek pembelian tanah yang diduga digelembungkan (markup). Salah satunya adalah pembelian tanah seluas 41.921 m2 di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tahun 2019. ● osm



FOTO: ANT

KAMPANYE CEGA PEROKOK ANAK

Seorang relawan melakukan edukasi tentang bahaya merokok kepada kasir sebuah mini market saat kampanye "Cegah Perokok Anak" di Peta Barat Cengkareng, Jakarta, Rabu (17/3). Kampanye ini dilakukan untuk mempercepat target pemerintah dalam menurunkan angka perokok anak hingga 8,7 persen pada tahun 2024 mendatang, yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Hindari Macet, Gubernur Anies Berangkat Kerja Naik MRT Ratangga

JAKARTA (IM) - Padataunya lalu lintas di Jakarta, membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memilih berangkat kerja naik kereta MRT Ratangga, pagi tadi.

Anies memastikan, protokol kesehatan ketat dijalankan sejak memasuki area stasiun, semua penumpang diukur suhunya dan wajib memakai masker dengan benar.

"Ketika di dalam Ratangga pun dilarang mengobrol maupun berbicara melalui telepon," tulis Anies melalui Instagram resminya, Rabu (17/3).

Kapasitas Ratangga sebelum memberlakukan protokol kesehatan ketat adalah 144-158 baik penumpang duduk dan berdiri, setelah adanya protokol kesehatan ketat kapasitasnya berkurang menjadi hanya 62-67 orang dalam 1 kereta.

Pengurangan jumlah tersebut bertujuan untuk membuat

penumpang dapat menjaga jarak satu sama lain saat di kereta.

Dikatakan Anies, keuntungan naik Moda Raya Terpadu (MRT) adalah bebas macet sehingga punya waktu lebih sebelum sampai ke Balai Kota. Anies pun menyempatkan diri untuk berbincang bersama sejumlah pejabat.

"Turun di Stasiun Dukuh Atas untuk ngobrol sebentar dengan Pak Dhany Sukma, Wali Kota Jakarta Pusat. Kami sambil inspeksi beberapa fasilitas publik di sekitar Stasiun Dukuh Atas," tuturnya.

Mantan Mendikbud itu juga menanyakan soal jajanan enak kepada warganet.

"Teman-teman ada yang sering naik/turun MRT" dari Dukuh Atas? Ada jajanan apa yang enak di sekitar sini?" ujarnya. ● osm

PT BESTARI INDOPRIMA (DALAM LIKUIDASI) PANGGLILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi perseroan terbatas PT BESTARI INDOPRIMA (DALAM LIKUIDASI), berkedudukan di Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut "Perseroan") dengan mengundang seluruh pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin 5 April 2021
Waktu : 10.00 - 11.00 WIB
Tempat : Sentral Senayan 2 Lt.16 Jl. Asia Afrika No.8, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB):

- Menyetujui neraca akhir hasil likuidasi Perseroan;
- Menyetujui laporan pertanggungjawaban Likuidator Perseroan serta pemberian pembebasan dan pelunasan kepada Likuidator;
- Menyetujui pemberhentian dan membubarkan Likuidator Perseroan;
- Menyetujui untuk tidak memberikan honorarium kepada Likuidator.

Catatan:

- Perseroan tidak mengumumkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan karena iklan ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 anggaran dasar dan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.
- Para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan atau kuasanya.
- Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dan wajib membawa Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya.
- Para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 18 Maret 2021
PT BESTARI INDOPRIMA (DALAM LIKUIDASI)
Hi Hery Wong
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBIL ALIHAN PT MANDALA ARMADA NUSANTARA

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan kepada semua pihak dan karyawan bahwa adanya rencana pengambil alihan atas sebagian saham-saham/saham mayoritas milik PT MANDALA ARMADA NUSANTARA ("Perseroan"), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan.

yang mengakibatkan perubahan pengendalian pada Perseroan. Bagi Kreditor atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, dapat mengajukan keberatannya secara tertulis mengenai rencana akuisisi tersebut dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini kepada:

PT MANDALA ARMADA NUSANTARA
Sana Topas Tower Lantai 5A
Jl Jendral Sudirman Kav 26
Karet - Setiabudi
Jakarta Selatan
0212506778

Jakarta, 18 Maret 2021
Direksi
PT MANDALA ARMADA NUSANTARA